



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Mei 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SINGGIH WIJAYANA**
2. Jabatan : **DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **818861**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.010.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/69 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 1.112 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
5. Tanah Seluas 983 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
6. Tanah Seluas 1.020 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 210.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, DATSUN GO+PANCA T1.2M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11D1CF A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



4. MOTOR, HONDA NC11B3CA/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.000.000

5. MOTOR, HONDA D1B02N12L2A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

6. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 60.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 54.000.000

Sub Total Rp. 3.384.000.000

III. HUTANG Rp. 1.602.321.691

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.781.678.309

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.